

## Upaya Pemerintah Turki dalam Mengatasi Konflik dengan *Syrian Democratic Forces*

Hamim Ilmawan<sup>1</sup>, Adhiningasih Prabhawati, Sus Eko Zuhri Ernanda  
170910101055@unej.ac.id, adhining@unej.ac.id, eko.ernada@unej.ac.id

### *Abstract*

*The conflict between the Turkish Government and the Syrian Democratic Forces (SDF) is one aspect that is difficult to resolve in the Syrian civil war which began in 2011. Turkey considers it necessary to handle it in the form of conflict resolution related to the ongoing conflict. In the peace studies, there are three implementation elements, namely peace keeping, peacemaking, and peace building. This research uses qualitative methods, using literature reviews to obtain secondary data. The results of this research are that Turkey initiated three military operations as a peace strategy, namely Operation Euphrates Shield, Operation Olive Branch and Operation Peace Spring as peace keeping. To maintain the attack, Turki with its peace keeping policy needs to arrange their military. After that, Turki also needs the peacemaking just to make sure that they can finally minimize the damage of its operation. The peacemaking that Turkey did was cooperation with United State, cooperation with EU, and normalization of cooperation between Turkey and Syria.*

**Keyword:** *Peace Studies, Peacekeeping, Peacemaking, Turkiye, Syrian Democratic Forces*

### **Abstrak**

Konflik antara Pemerintah Turki dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) merupakan salah satu aspek yang sulit diselesaikan dalam perang saudara Suriah yang dimulai pada tahun 2011. Turki memandang perlu untuk menanganinya dalam bentuk resolusi konflik terkait konflik yang sedang berlangsung. . Dalam studi perdamaian, terdapat tiga elemen implementasi, yaitu pemeliharaan perdamaian, penciptaan perdamaian, dan pembangunan perdamaian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan tinjauan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian tersebut adalah Turki menggagas tiga operasi militer sebagai strategi perdamaian, yaitu Operasi Perisai Eufkrat, Operasi Ranting Zaitun, dan Operasi Mata Air Perdamaian sebagai penjaga perdamaian. Untuk mempertahankan serangan, Turki dengan kebijakan penjaga perdamaiannya perlu mengatur militernya. Setelah itu, Turki juga membutuhkan upaya perdamaian untuk memastikan bahwa mereka pada akhirnya dapat meminimalkan dampak buruk dari operasi tersebut. Upaya perdamaian yang dilakukan Turki adalah kerja sama dengan Amerika Serikat, kerja sama dengan UE, dan normalisasi kerja sama antara Turki dan Suriah

**Kata Kunci:** *Studi Perdamaian, Peacekeeping, Peacemaking, Turki, Syirian Democratic Forces*

---

<sup>1,2,3</sup> Universitas Jember

## 1. Pendahuluan

Konflik antara Pemerintah Turki dan *Syrian Democratic Forces* (SDF)<sup>2</sup> merupakan salah satu aspek yang sulit untuk diselesaikan dari perang saudara Suriah yang dimulai pada tahun 2011. Pemerintah Turki untuk melakukan serangkaian operasi militer di Suriah Utara dengan tujuan mengusir SDF yang berada disana dari perbatasan Turki dan Suriah serta mencegah pembentukan entitas Kurdi yang memiliki pemerintahan otonominya sendiri. Pemerintahan Turki telah melancarkan beberapa operasi besar seperti Operasi Perisai Eufrat, Operasi Ranting Zaitun, dan Operasi Mata Air Perdamaian. Setiap operasi memiliki tujuan yang sama yaitu melakukan pengusiran terhadap pasukan Kurdi dari wilayah perbatasan Turki dan menciptakan zona aman bagi pengungsi Suriah di dalam wilayah Suriah.

Selain dari beberapa operasi militer yang telah dilakukan, pemerintah Turki juga menjalin kerja sama dengan aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara dalam mengatasi ancaman yang ada. Ada beberapa negara yang menjadi kunci dalam percaturan politik internasional yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Turki juga menjalin kerja sama dan komunikasi dengan negara-negara penting yang ada di wilayah regionalnya seperti Iran dan Irak dimana kedua negara tersebut juga memandang etnis Kurdi sebagai ancaman.

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Turki dengan SDF sangatlah kompleks. Keterlibatan sebagian besar actor menjadi penambah kompleksitas dari konflik ini. Perlu adanya sebuah upaya yang Turki lakukan dalam mengatasi permasalahan yang tengah terjadi. Sebagai negara yang tengah berkonflik, Turki memerlukan pihak lain untuk menawarkan resolusi konfliknya. Akan tetapi, ada beberapa situasi yang dapat diadaptasi oleh Pemerintah Turki ketika mereka ingin mengatasi permasalahan tersebut dengan cepat, yakni dengan menggunakan metode studi perdamaian. Melalui fakta tersebut, Turki masih dapat membuat sebuah pergerakan untuk meminimalisir adanya kerusakan akibat konflik yang terjadi. Oleh sebab itu, penulis memutuskan untuk mengkaji upaya seperti apa yang akan Turki lakukan melalui pendekatan metode studi perdamaian. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang Upaya Pemerintah Turki dalam Mengatasi Konflik dengan *Syrian Democratic Forces*.

### **Konsep *Peace Studies* (*Peacekeeping*, *Peacemaking*, dan *Peacebuilding*)**

Johan Galtung membagi konsep dari perdamaian dalam dua tipologi yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif bisa diartikan menjadi tidak adanya kekerasan atau tidak adanya perang (Tilahun, 2015: 251). Perdamaian negatif memerlukan peran pemerintah dalam menghadapi konflik yang terjadi. Peran yang bias dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pengamanan dan perlindungan yang dijalankan oleh aparat keamanan di wilayah-wilayah perbatasan konflik. Dengan menghadirkan perdamaian negatif, maka pihak yang tengah berkonflik tidak akan bertemu dan menciptakan ruang bersama untuk menghasilkan perdamaian yang diinginkan.

---

<sup>2</sup> SDF atau *Syrian Democratic Forces* merupakan koalisi multi-etnis yang terdiri dari pejuang Kurdi, Aran, dan Kristen yang dibentuk pada bulan Oktober 2015 dengan dukungan Amerika Serikat. Pasukan ini didominasi oleh Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (PYG) yang didirikan tiga tahun sebelumnya. Ditulis oleh Wladimir van Wilgenburg, "*Syrian Democratic Forces (Syria)*" (<https://ecfr.eu/special/mena-armed-groups/syrian-democratic-forces-syria/>)

Perdamaian positif menunjuk pada suasana damai dengan terciptanya kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan. Perdamaian positif menganjurkan interaksi yang dalam antara warga masyarakat demi menghadirkan integrasi sosial. Perdamaian positif memerlukan kerja sama yang bertujuan untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan yang dihadapi serta menjadi tanggung jawab bersama. Menurut Johan Galtung, perdamaian positif menghadirkan hal-hal baik dalam kehidupan masyarakat, khususnya kerja sama dan integrasi antara kelompok yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan pemikiran mengenai perdamaian positif dan negatif, maka Johan Galtung menjelaskan tiga pendekatan untuk memperoleh perdamaian yakni *peacekeeping*, *peacemaking*, *peacebuilding*. Ketiga pendekatan ini memiliki kesinambungan dalam usaha memperoleh perdamaian. Pertama adalah *peacekeeping* merupakan pendekatan klasik yang digunakan oleh pihak yang berkuasa atau pemerintah. Pendekatan ini pada dasarnya bersifat disosiatif yaitu pihak yang berkonflik dijauhkan antara satu dengan lainnya dibawah ancaman hukuman yang cukup berat apabila melanggar perjanjian yang telah dibuat terutama jika mereka melanggar ke wilayah masing-masing.

Kedua adalah *peacemaking* merupakan proses yang bertujuan untuk mempertemukan atau merekonsiliasi dan merupakan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pemimpin. Pihak-pihak yang tengah berkonflik dipertemukan untuk mendapat penyelesaian dengan cara damai.

Ketiga adalah *peacebuilding* merupakan sebuah aktifitas yang memiliki ruang gerak luas mencakup dalam rekonsiliasi, transformasi sosial dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan. *Peacebuilding* berjalan setelah *peacekeeping* dan *peacemaking* dilakukan. *Peacebuilding* dilakukan dalam kurun waktu yang relative panjang. Hal ini tidak terlepas dari beberapa dimensi dalam melakukan *peacebuilding* yaitu presonal, relasional, kultur dan struktural.

## 1. Metodologi

Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif bersifat induktif, yaitu penelitian yang berorientasi pada penemuan dan proses (Pahleviannur et al. 2022). Objek penelitian pada skripsi ini akan berfokus pada proses resolusi konflik yang diambil oleh pemerintah Turki dalam menyelesaikan konflik Turki dengan etnis Kurdi. Batasan waktu yang penulis gunakan adalah tahun 2011 hingga tahun 2019. Penetapan tahun 2011 sebagai awal Batasan materi karena bertepatan dengan kemunculan dari Arab Spring. Arab Spring merupakan sebuah fenomena yang terjadi di Timur Tengah. Fenomena tersebut mengakibatkan adanya instabilitas pada negara-negara Arab yang diperpara oleh kemunculan dari demonstrasi besar-besaran. Batasan waktu berakhir pada tahun 2019, karena proses resolusi yang dilakukan oleh pemerintah Turki baru bias terlaksana dengan baik dan menemui kesepakatan antara pemerintah Turki dan etnis Kurdi yang berada di Suriah Utara

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka. Dalam penggunaan teknik studi pustaka, penulis akan mengumpulkan data melalui sumber-sumber sekunder yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan sumber memerlukan pengolahan data dengan menggunakan keabsahan

pada data. Pada penelitian ini, keabsahan atau triangulasi data yang digunakan oleh penulis adalah triangulasi sumber.

## 2. Hasil dan Diskusi

### ***Peacekeeping* melalui Operasi Militer**

Strategi *peacekeeping* Turki dalam menangani konflik dengan *Syrian Democratic Forces* adalah resolusi konflik berbentuk operasi militer. Sesuai dengan komponen konsep *peace studies*, *peacekeeping* merupakan metode awal dalam menjaga perdamaian pada suatu wilayah. Pada konteks pembahasan ini, Turki menganggap keberadaan SDF sebagai ancaman, sehingga Turki memerlukan tindakan resolusi yang sedikit bersifat represif. Tindakan tersebut ialah penerapan operasi militer. Berdasarkan dengan kebijakan luar negeri Pemerintah Turki dalam menyikapi konflik ini, operasi militer Turki terbagi menjadi tiga, yakni Operasi Perisai Eufrat, Operasi Ranting Zaitun, dan Operasi Musim Semi Perdamaian.

### **Operasi Perisai Eufrat (*Operation Eufhrate Shield*)**

Sejak musim semi tahun 2015, Turki telah mengalami gelombang serangan teror tingkat tinggi yang terkait dengan kelompok yang memproklamkan diri sebagai Negara Islam (ISIS) dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Sebagai tanggapan, Turki mengerahkan pasukan tempur darat melintasi perbatasan ke Suriah dengan tujuan mendorong pasukan ISIS dan Kurdi keluar dari zona aman yang mereka nyatakan sendiri. Operasi militernya yang dilakukan di Suriah sebagian dirancang untuk memberikan perlawanan kepada pemberontakan yang dihadapi di wilayah perbatasannya. Keterkaitan antara konflik Suriah dan keamanan dalam negeri Turki mendorong ketidakstabilan politik dalam negeri dan akibat dari konflik di Suriah akan berdampak pada hubungan Amerika Serikat dan Turki serta tujuan kebijakan Amerika Serikat di Suriah.

Selain itu, Turki menganggap kelompok nasionalis Kurdi bersenjata sebagai ancaman besar terhadap keamanannya. Yang semakin memperumit situasi adalah upaya Turki dan Amerika Serikat untuk melemahkan ISIS dapat memperkuat kelompok ekstremis lainnya di lapangan, seperti Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sebuah organisasi payung yang didominasi oleh elemen Al-Qaeda. HTS-sebelumnya dikenal sebagai Jabhat Fateh Al-Sham dan sebelumnya Jabhat Al-Nusra, bertempur bersama kelompok pemberontak Suriah lainnya.

Dinamika regional perang sipil Suriah semakin rumit pada tanggal 24 Agustus 2016, ketika Turki mengirimkan batalion lapis baja dan mendukung pasukan darat ke Suriah Utara untuk berperang bersama dengan hamper tiga ribu pemberontak sekutu. Operasi ini dijuluki dengan Operasi Perisai Eufrat. Operasi Perisai Eufrat melakukan pembersihan perbatasan para pejuang ISIS pada awal September 2016, yang memicu seruan dari para pemimpin politik Turki untuk menggunakan kekuatan yang berguna untuk memperluas operasi hingga mencakup Al-Bab, sebuah kota yang terletak tiga puluh kilometer di selatan perbatasan Turki. Bagi ISIS, Al-Bab adalah basis pajak dan merupakan pusat operasi terakhir bagi juru bicara mereka saat itu, Abu Muhammad Al-Adnani, yang terbunuh dalam serangan pesawat tak berawak pada Agustus 2016. Bagi Turki, kota ini sangat penting dalam memblokir ekspansi Kurdi

dan juga mengukir zona aman yang dideklarasikan sendiri bagi para pengungsi yang saat ini berada di Turki untuk kembali ke Suriah.

### **Operasi Ranting Zaitun (*Operation Olive Branch*)**

Pada tanggal 20 Januari 2018, Turki secara resmi mengumumkan peluncuran operasi militer yang disebut dengan Operasi Ranting Zaitun di kota Afrin, barat laut Suriah. Operasi tersebut memakan waktu hingga dua bulan untuk melakukan pembersihan dari pasukan YPG. Ada beberapa tujuan Turki melakukan operasi tersebut antara lain:

- a. Menghilangkan ancaman terorisme yang dilakukan oleh YPG di wilayah perbatasannya dengan Suriah.
- b. Menyediakan jalan yang aman bagi pengungsi Suriah.
- c. Turki menganggap meningkatnya kekuatan PKK di wilayah lain sebagai ancaman terhadap keamanan dalam negeri.
- d. Turki menganggap Afrin sebagai wilayah yang digunakan oleh YPG dan PKK untuk mentransfer amunisi dan militan.

Selama operasi tersebut, lebih dari 750.000 warga sipil berada di Afrin. Beberapa pihak berpendapat bahwa operasi militer Turki di Suriah merupakan pelanggaran hukum dalam dunia internasional. Turki merasa bahwa mereka memiliki hak untuk mengamankan daerah perbatasannya dengan Suriah karena lebih dari 700 serangan terhadap wilayah Turki dilancarkan dari perbatasan tersebut (Urundul, 2018: 1). Operasi Ranting Zaitun yang dilakukan Turki merupakan operasi yang berpotensi memberikan dampak besar terhadap stabilitas keamanan nasional Suriah pada tahun 2018. Meskipun demikian, Hal ini dilakukan untuk mewujudkan prinsip perdamaian di dalam negeri dan perdamaian di luar negeri.

### **Operasi Musim Semi Perdamaian (*Operation Peace Spring*)**

*Operation Peace Spring*, yang diluncurkan pada tanggal 9 Oktober 2019, merupakan operasi militer besar ketiga Turki di wilayah Suriah sejak tahun 2016, setelah operasi 'Perisai Eufkrat' dan 'Ranting Zaitung'. Operasi ini merupakan upaya bagi Turki untuk mengusir SDF/PYD dari perbatasan Suriah-Turki, sehingga membuka jalan untuk menciptakan 'zona aman' di Suriah Utara yang mengakomodasi pemukiman kembali hingga 2 juta pengungsi Suriah. Pertempuran antara pasukan Turki dan sekutu dengan SDF berlanjut selama 10 hari hingga 18 Oktober, ketika Mike Pence, wakil presiden Amerika Serikat, mengumumkan bahwa Washington dan Ankara telah menyepakati gencatan senjata atas serangan Turki.

Pada akhirnya, terjadi gencatan senjata antara pihak yang terlibat. Akan tetapi, gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat sebagian besar bertahan dengan hanya menyisakan pertempuran sporadis yang dilaporkan berlangsung selama lima hari. Kesepakatan gencatan senjata kedua dicapai antara Turki dan Rusia untuk memberikan waktu selama 150 jam lagi kepada para pasukan Kurdi untuk menyelesaikan penarikan mereka dari 'zona aman' yang telah direncanakan. Sesuai dengan perjanjian tersebut, pasukan SDF juga akan mundur dari kota-kota penting yang saat ini dikuasai Suriah di dekat perbatasan, seperti Manbij dan Kobane.

## **Penerapan *Peacemaking***

### **Kerja Sama Amerika Serikat dan Turki**

Pada bulan Desember tahun 2018, Presiden Donald Trump memberikan pengumuman untuk melakukan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Suriah utara yang sebelumnya tergabung dalam koalisi untuk memerangi ISIS (Rhode 2019). Mengetahui hal tersebut, Pemerintah Turki segera mengupayakan untuk membangun sebuah zona aman dari berbagai organisasi teroris sehingga dapat menjadi tempat kembali para pengungsi Suriah. Pembuatan *safe zone* tersebut dipicu oleh dua permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Turki. Yang pertama wilayah di sepanjang perbatasan Jarablus hingga Al Malikiyah dikuasai oleh YPG atau PYD atau PKK yang memimpin SDF yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Pemerintah Turki.

Amerika Serikat sebagai sekutu dari Turki didalam organisasi NATO dan sebagai pihak yang membantu SDF secara umum setuju dalam pembangunan *safe zone* setelah Amerika Serikat meninggalkan Suriah bagian utara. Amerika Serikat merasa bahwa wilayah yang akan dijadikan sebagai *safe zone* oleh Turki nantinya akan dikontrol dibawah pasukan NATO, bukannya Turki seorang (Gadelmola 2020).

Menghadapi dilema antara memilih SDF sebagai sekutunya dalam melawan ISIS atau Turki sebagai sekutu NATO, Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump membuat kesepakatan dengan Presiden Erdogan untuk membangun sebuah *buffer zone* dan kesepakatan untuk melakukan patrol bersama sepanjang perbatasan Sungai Eufrat hingga Tigris (Arafat 2019). Meskipun kedua belah pihak telah menerima kesepakatan tersebut, namun keduanya tidak secara jelas memberikan penjelasan tentang seluas apa *safe zone* tersebut dan bagaimana mekanisme control dari *safe zone* tersebut.

Pemimpin dari pasukan SDF, Mazloum Abdi menyatakan bahwa kesepakatan tersebut menerangkan bahwa panjang dari *safe zone* yang telah disepakati adalah sepanjang perbatasan Turki dan Suriah yang dibatasi oleh Sungai Eufrat dan Tigris dengan kedalaman *safe zone* yang bervariasi (Arafat 2019).

### **Normalisasi Hubungan Pemerintah Turki dengan Syria**

Upaya *peacemaking* kedua yang pemerintah Turki lakukan untuk mengatasi konflik dengan SDF adalah dengan melakukan normalisasi hubungan dengan pemerintah Syria. Pada konteks pembahasan terkait dengan konflik Turki dan SDF, pemerintah Syria memiliki peranan penting. Rezim Syria yang dipimpin oleh Bassar Al-Assad selama 10 tahun terakhir mendapatkan perlakuan yang represif dari pemerintah Turki, terutama dari Erdogan (*Foreign Policy*, 2024).

Meskipun demikian, melalui pernyataan resminya, Presiden Erdogan memutuskan untuk menormalisasi hubungan dengan Syria. Hal tersebut bertujuan agar meminimalisir adanya pertempuran dengan SDF (*Foreign Policy*, 2024). Bukan hanya itu, Erdogan memiliki harapan lain melalui hubungan normalisasi ini.

Harapan Turki dengan adanya normalisasi selain meredam pertempuran dengan SDF adalah penghentian gerakan separatisme orang-orang Kurdi yang mengganggu kawasan perbatasan Turki dengan Syria. Gerakan separatism orang Kurdi tidak hanya memblokir mobilitas perbatasan Turki, akan tetapi hal tersebut berdampak kepada kapabilitas pemerintah Turki dalam menangani permasalahan pengungsi (*refugee*).

Secara spesifik, Turki memberikan fasilitas terkait dengan bantuan pengungsi, Berfokus kepada dinamika pengungsi akibat konflik, perbatasan Turki dan Suriah Utara telah menjadi tempat yang tidak terkendali (*Reuters*, 2019). Keputusan Turki untuk menormalisasi hubungan dengan Suriah mengacu kepada hambatan bantuan pengungsi oleh Pemerintah Turki di perbatasan. Walaupun secara literal gerakan separatisme berada di perbatasan, akan tetapi secara geografis sebagian besar personil gerakan ini berada di kawasan teritorial negara Suriah (EPRS, 2023).

### **Hubungan Turki dengan Uni Eropa**

Urgensi Pemerintah Turki dalam membantu para pengungsi sangatlah besar. Setelah apa yang terjadi akibat dari operasi militer, Turki mencoba untuk bergerak cepat dalam proses penanganan korban perang yang menjadi seorang pengungsi. Langkah tersebut bertujuan untuk meminimalisir tingginya korban terdampak serangan yang dilakukan oleh militer Turki. Selama proses penanganan pengungsi, Turki memproyeksikan pendekatannya dengan mempertimbangkan potensi jangka panjang penerapan program zona pemukiman pengungsi (*American Progress*, 2023). Tidak hanya itu, Turki juga mendapatkan bantuan dari Uni Eropa. Uni Eropa memiliki beberapa andil dalam proses penanganan pengungsi.

Dalam mengendalikan kondisi wilayah akibat perpindahan penduduk dengan skala yang besar, pihak Uni Eropa mencoba untuk memilah besarnya persebaran pengungsi. Langkah yang diambil oleh Uni Eropa adalah dengan membentuk manajemen internasionalisasi, dengan mengupayakan potensi permanen okupasi pada radius 2800-4000 miles (CAP, 2023).

Segala upaya yang Uni Eropa lakukan dalam menangani permasalahan pengungsi pada kasus Turki dan SDF bertujuan untuk menciptakan sebuah perdamaian. Keinginan Uni Eropa untuk ikut andil dalam proses resolusi konflik Turki dan SDF akan menjadi lebih kompleks karena permusuhan tetap terjadi antara Turki dan Suriah mengingat sifat keterlibatan Turki di wilayah yang saat ini dikuasai. (Stanicek 2020). Hal yang bisa dilakukan oleh Uni Eropa sebagai bentuk bantuan kepada konflik ini adalah dengan memasukkan peran Turki di Suriah sebagai poin diskusi penting dalam dialog antara Uni Eropa dan Turki dengan tujuan memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap pengungsi Suriah di Turki dan etnis Kurdi di Suriah.

### **3. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menyimpulkan bahwa Upaya Turki dalam mengatasi konfliknya dengan pihak SDF menggunakan strategi operasi militer. Dengan menggunakan pendekatan konsep *peace studies*, Turki menggunakan dua komponen dalam pendekatannya terhadap konflik yang sedang terjadi, yakni *peacekeeping* dan *peacemaking*. *Peacekeeping* yang diterapkan oleh Pemerintah Turki berupa strategi operasi militer, sedangkan *peacemaking* yang dilakukan oleh Pemerintah Turki adalah menjalin hubungan dengan negara/ pihak lain yang bertujuan untuk meminimalisir dampak yang telah terjadi.

## Daftar Pustaka

- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. 2020. "SENI MENGELOLA DATA: PENERAPAN TRIANGULASI TEKNIK, SUMBER DAN WAKTU PADA PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL." *Jurnal Kajian, Penelitian&Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol. 5 No. 2:146–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>, 146-150
- Anadolu Agency. 2018. "4,000 Terrorists Neutralized in Afrin: Erdogan." April 8, 2018. <https://www.aa.com.tr/en/politics/4-000-terrorists-neutralized-in-afrin-erdogan/1111464>.
- Bercovitch, Jacob. 1992. "The Structure and Diversity of Mediation in International Relations." *Mediation in International Relations*, 1` – 29.
- Borisoff, Deborah, and David A. Victor. 1997. *Conflict Management: A Communication Skills Approach*. 2nd ed. Pearson, 1-256
- Boulding, Kenneth Ewart. 2012. *Conflict And Defense: A General Theory*. Literari Licensing, LCC, 1-360
- Bowen, Jeremy. 2020. "Syria War: Russia and Turkey Agree Idlib Ceasefire." BBC. March 6, 2020. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51747592>.
- Burton, John. 1972. *World Society*. Cambridge : Cambridge University Press. U.K, 1-180
- Burton, John, and Frank Dukes. 1990. *Conflict: Practices in Management, Settlement and Resolution*. New York: St. Martin's Press, 1-230
- Burton, John Wear. 1979. *Deviance, Terrorism and War: The Process of Solving Unsolved Social and Political Problems*. 1st ed. Palgrave Macmillan, 1-240
- Çevik, Salim. 2022. "Turkey's Military Operations in Syria and Iraq." *Centre for Applied Turkey Studies*, May, 1–8.
- Coser, Lewis A. 1957. "Social Conflict and the Theory of Social Change." *The British Journal of Sociology* 8 (3): 197–207.
- Donelan, M. D., and M. J. Grieve. 1972. "International Disputes: Case Histories 1945-1970" 4 (3): 1–286.
- Fearon, J. D., and D. D. Laitin. 2003. "Ethnicity, Insurgency, and Civil War." *American Political Science Review* 97 (1): 75–90.
- Gunter, Michael M, and M. Hakan Yavuz. 2020. "The October 2019 Turkish Incursion into Kurdish Syria: Its Background & Broader Implications." *Middle East Policy* XXVII (1): 86–101.
- Gurr, Ted Robert. 1994. "People Against States: Ethnopolitical Conflict and the Changing World System." *International Studies Quarterly* 38 (3): 347–377.
- Hammond, R. A., and R. Axelrod. 2006. "The Evolution of Ethnocentrism." *The Journal of Conflict Resolution* 50 (6): 926–36.



- Jazeera, Al. 2019. "Full Text of Turkey, Russia Agreement on Northeast Syria." October 22, 2019. <https://www.aljazeera.com/news/2019/10/22/full-text-of-turkey-russia-agreement-on-northeast-syria/>.
- McKernan, Bethan, and Julian Borger. 2019. "Pence and Erdoğan Agree on Ceasefire Plan but Kurds Reject 'Occupation.'" *The Guardian*. October 17, 2019. <https://www.theguardian.com/world/2019/oct/17/us-delegation-seeks-syria-ceasefire-after-trump-undercuts-mission-turkey-mike-pence>.
- Mulinge, Munyae M. 2008. "Botswana, Africa's Haven of Ethnic Peace and Harmony: Status and Future Prospects." *African Jurnal of Sociology* 4 (1): 61–85.
- Nafpliotis, A. 2012. "Peter Wallensteen. 'Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System', Sage, 2011." *Journal of Conflict Transformation & Security* 2 (2): 1–3.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Merdianto, Ns. Debby Sinthania, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, et al. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 1-247
- Posen, B. R. 1993. "The Security Dilemma and Ethnic Conflict" 35 (1): 27–47.
- Stanicek, Branislav. 2019. "Turkey's Military Operation in Syria and Its Impact on Relations with the EU." *European Parliamentary Research Services*, November, 1–4.
- . 2020. "EU-Turkey Relations in Light of the Syrian Conflict and Refugee Crisis." *European Parliamentary Research Service*, March, 1–4.
- Stein, Arthur A. 1976. "Conflict and Cohesion." *Journal of Conflict Resolution* 20 (1): 143–172.
- Ülgen, Sinan, and Can Kasapoğlu. 2017. "Operation Euphrates Shield: Aims and Gains." *Carnegie Europe*. January 19, 2017. <https://carnegieendowment.org/posts/2017/01/operation-euphrates-shield-aims-and-gains?lang=en&center=europe>.
- Umaña-Taylor, A. J., R. Bhanot, and N. Shin. 2006. "Ethnic Identity Formation During Adolescence." *Journal of Family Issues* 27 (3): 390–414.
- Uras, Umut. 2019. "Turkey's Operation Peace Spring in Northern Syria: One Month On." November 8, 2019. <https://www.aljazeera.com/news/2019/11/8/turkeys-operation-peace-spring-in-northern-syria-one-month-on>
- Utomo, Adi Priyanto. 2019. "Sejak 2016, Pasukan Turki Sudah 3 Kali Menggempur Kurdi Di Suriah." October 10, 2019. <https://internasional.kompas.com/read/2019/10/10/19041711/sejak-2016-pasukan-turki-sudah-3-kali-menggempur-kurdi-di-suriah?page=all>.
- Vanhanen, Tatu. 1999. "Domestic Ethnic Conflict and Ethnic Nepotism: A Comparative Analysis." *Journal of Peace Research* 36 (1): 55–73.

- Williams, Dodeye Uduak. 2015. "How Useful Are the Main Existing Theories of Ethnic Conflict?" *Academic Journal of Interdisciplinary* 4 (1): 147–151.
- Yüksel, Engin, and Erwin van Veen. 2019. "Turkey in Northwestern Syria: Rebuilding Empire at the Margins." *Netherlands Institute of International Relations*, June, 1–11.